

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, KINERJA KEUANGAN DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PENINGKATAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Kasus Provinsi Lampung)**

**OLEH
CHERLIANA HENDRA NURHARYANTO
1712120045**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan
Bisnis Darmajaya
Jl. Z.A. Pagar Alam No.93, Gedong Meneng, Bandar Lampung 35142–
INDONESIA Telp. (0721)787214 Fax. (0721) 700261
E-mail: cherlianahendra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah, kinerja keuangan dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil pengujian variabel menyatakan bahwa Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemandirian Daerah, Derajat Desentralisasi, Belanja Modal

Jurnal Akuntansi : Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Periode 2018-2020)

IIB
DARMAJAYA
2021

PENDAHULUAN

Konsep Pembangunan Manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai penghidupan yang layak.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan sebuah wilayah. Menurut UNDP pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of the people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (BPS, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Manfaat IPM menjadi sangat penting karena bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dimana salah satu alokatornya adalah IPM.

Dari kutipan News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia.” Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!”. Diakses 12 Juli 2021. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Untuk semua aspek yang dievaluasi Indonesia jelas tertinggal jauh dari Singapura yang menyandang predikat IPM sangat tinggi dan berada di peringkat 11 dunia. Jika dibandingkan dengan Brunei pun masih tertinggal. Bahkan untuk semua aspek Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia. Namun apabila dibandingkan dengan Thailand, Indonesia masih lebih unggul dalam hal rata-rata lama sekolah.

Penurunan IPM Indonesia di skala internasional, dipengaruhi oleh perkembangan IPM di dalam negeri. Perkembangan IPM di Indonesia baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Pada

tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi perhitungan IPM. Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada metode baru. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita pada metode baru. Penghitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada metode baru. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Menurut Astri dkk. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pelayanan publik yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah

daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengolah keuangan daerahnya sehingga terkelola dengan optimal yang berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Dewi, 2014).

Selanjutnya kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintahan, terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan.

Belanja modal secara umum dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung aspek pembangunan manusia di wilayahnya, seperti gedung/bangunan sekolah yang layak dan ketersediaan alat peraga atau laboratorium di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar, gedung/bangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas yang nyaman dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang memadai di setiap FKTP, serta infrastruktur jalan/jembatan yang memperlancar akses transportasi dan aktifitas ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat baik komoditas makanan dan non makanan.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan proksi derajat desentralisasi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Gita (2020), Prakoso (2020), Anton (2017), Andin (2017) dan Kiki (2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian serta penambahan variabel, peneliti menggunakan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 - 2020 serta penambahan variabel kemandirian daerah dan belanja modal. Maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal**

Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2018-2020”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 2) Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di utarakan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020
- 2) Untuk membuktikan secara

empiris pengaruh Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak..Teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif adalah *principal* (Halim, 2010).

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah pusat adalah sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen yang dapat dilihat dari tindakan pendelegasian dana perimbangan kepada daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari adanya pendelegasian wewenang tersebut dan dana tersebut digunakan

untuk membiayai seluruh belanja pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2008: 9), IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015).

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari

eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dihitung

berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004).

Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2, Permendagri nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Bangunan Hipotesis

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Penelitian Prakoso (2020) Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi

rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007).

H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan proksi rasio derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM. Menurut Penelitian Gita (2020) Semakin tinggi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakintinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya

merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan manusia.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM.

H2: Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Penelitian Kiki (2016) Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, total penerimaan belanja modal dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi umum seperti jalan, dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan berbagai bidang karena tidak semua belanja modal berefek pada publik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Zayendra, (2016) mengatakan belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

- Data pendapatan daerah berupa PAD, dana perimbangan/transfer, pinjaman daerah, data belanja modal, LRA (audited) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018-2020 kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung, yang diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK.

- Data IPM yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah Triangulasi (Sugiyono, 2013). Data yang dikumpulkan melalui triangulasi yaitu dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dari Biro keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Provinsi Jawa dan website Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sampel

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method (Sugiono, 2012). Data yang digunakan adalah laporan realisasi pendapatan daerah, laporan statistik keuangan daerah Lampung sebagai alat ukur kemandirian daerah, kinerja

keuangan dengan rasio derajat desentralisasi dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2018-2020.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variable independen yang digunakan adalah kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan proxi derajat desentralisasi dan belanja modal

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan	15
4	Jumlah Observasi (3 tahun x 15)	45
Jumlah sampel		45

Uji Normalitas

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,6297468
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,147
	Absolute Negative	,086
		-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		,989
Asymp. Sig. (2-tailed)		,282

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yaitu 0,282. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	63,280	,894			
KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	,026	38,980
KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	,027	36,478
BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	,668	1,498

a. Dependent Variable: IPM

Pada Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 ^a	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

Dari hasil uji *Durbin Watson* pada tabel 4.5, diketahui nilai *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 2,410 dengan batas atas (DU) 1,7574. Nilai DW lebih besar dari batas atas (DU) 1,7574 dan kurang dari 4 -1,7574 = 2,2525 (4 -DU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,528	,485		1,089	,283

KEMAN DIRIAN DAERA H KINERJ A KEUAN GAN BELANJ A MODAL	-8,175	6,494	-1,182	-1,259	,215
	15,425	11,746	1,193	1,313	,196
	2,091E -009	,000	,235	1,278	,209

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel kemandirian daerah, efektivitas pad dan belanja modal memiliki nilai signifikan $> 0,05$ ($0,215$; $0,196$; $0,209 > 0,05$). Artinya 3 variabel memenuhi syarat terhindar dari heteroskedatisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.7

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	63,280	,894		70,799	,000	
KEMAN DIRIAN DAERA H KINERJ A KEUAN GAN	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000	
	144,585	21,633	2,617	6,684	,000	

BELAN JA MODAL	-1,035E- 009	,000	-.027	-.343	,733
----------------------	-----------------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: IPM

Dari tabel diatas diketahui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,827 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen yaitu sebesar 82,8% dan sisanya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji F-test

Tabel 4.8

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regres sion	561,568	3	187,189	65,671	,000 ^b
1 Residu al	116,867	41	2,850		
Total	678,435	44			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

Dari hasil uji ANOVA atau *F test*, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena semua variabel independen (Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal) berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Uji t-test

Tabel 4.9

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	63,280	,894			70,799	,000
Kemandirian Daerah	-52,537	11,960	-1,778		4,393	,000
Kinerja Keuangan	144,585	21,633	2,617		6,684	,000
Belanja Modal	-1,035E-009	,000	-,027		-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Kemandirian Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H1 diterima.

2. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan Derajat Desentralisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Derajat

Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H2 diterima.

3. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan variable Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,733 yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H3 ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel efektivitas pad berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD dan itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Rasio

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD

Seperti penelitian Hanif (2018) yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh pada IPM. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat mandiri dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat pemerintah Provinsi Lampung memiliki sumber daya pendanaan selain PAD yang berasal dari total pendapatan daerah yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan IPM.

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Prakoso (2017), yang menyatakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun sejalan dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016) yang menyatakan Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada IPM. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila

teralisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratowo (2012) dan Priambodo (2015). Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect*

ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi dan Belanja Modal yang diuji pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 15 sampel sebanyak 3 tahun berturut – turut sehingga sampel yang didapat sebesar 45 sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan Purposive sampling dan data diolah menggunakan program SPSS 20.0.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang rentang penelitian sehingga kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang dapat lebih terlihat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti tingkat pengangguran, dana alokasi umum dan tingkat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, T. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dissertasi.

Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Astri, Meylina. Nikensari, S.I. dan Kuncara, Harya. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis* Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta

Badan pusat statistik (BPS), 2021. Indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja modal. <http://www.bps.go.id> diakses 11 Juli 2021.

Batafor, G. G. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Tesis. Bali. Universitas Udayana Denpasar.

Bati, 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). Universitas Sumatra Utara, Medan.

Cahyono,Hendry. 2015. Pengaruh Nilai Tukar Petani Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya.

Citradi, Tirta. CNBC Indonesia. 2020. *Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI*

- No 107 dari 189 Negara!*. Diakses 12 Juli 2021. Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2>
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal studi Kasus Kabupaten atau Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.
- Denni, S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal* ED AJ. 1(1).
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.
- Eka Siwi Hidayati, 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Lampung.
- Fitriani, Kiki. 2016. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di provinsi lampung periode 2013-2015. Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Ghozali, Imam., 2013. Uji Asumsi Klasik. Semarang : Badan UNDIP
- Ghozali, Imam., 2010. Uji Stastik T. Semarang: Badan UNDIP
- Ghozali, Imam., 2012. Analisis Dterminasi. Semarang : Badan UNDIP
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan syukriy Abdullah (2010). *Agency Theory Pemerintah Daerah*.
- Helfert, E. A. 1982. *Techniques of Financial Analysis* 5th Edition. Homewood, IL: Irwin
- Hobrouw, Yustina Asnad, Suaryana I Gusti Ngurah Agung, dan Putri I G.A.M Asri Dwija (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Udayana.

- Ida Ayu Cendara, Ni Luh Supadmi, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Irfan Hanif, Muhammad. 2018. Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode (2013-2017)).
- Kahang Merang, Saleh Muhammad, Suharto Rachmad Budi. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Universitas Mulawarman
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kapasitas Pembebanan Belanja Modal dan Pengeluaran Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Nilai Asset Belanja Modal.
- Peraturan Peresiden Nomor 71 tahun 2010 Tentang Belanja Modal Untuk Memperoleh asset Pemerintah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tentang Penyelenggaraan Akuntansi Asset Tetap.
- Prakoso, I. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Pratowo, Nur Isa. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Universitas Brawijaya Malang.
- Putu Gede, I Gusti Ketut Agung , 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Rai, I. G. A. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita & Supadmi, Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3.
- Sari, Febri Nur Gita. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Sarkoro, Hastu & Zulfikar.2016. Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.
- Setyowati dan Yohanankus Suparwati, 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.
- Sidiq Ariyanto, Farhan. 2018. Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani terhadap indeks pembangunan manusia dipulau sumatera tahun 2011-2016. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono,2013. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta Jenis Penelitian, Pengumpulan data dan Sumber.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol.1 (2):109-124.
- Suryaningsih, et. al. 2015. Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 40 (8):537-554. ISSN : 2337-3067.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

- Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Trianto, Anton. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang. 2017.
- Tria Desi Putri, Toto Gunarto, Saimut, 2014, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang kategori Belanja Modal
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Objek dan Retribusi Pajak Daerah.
- UNDP, 2004 Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id>, diakses tanggal 25 november 2015 Yovita, Farah Marta.
2011. Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja.
- UNDP. 1995. Human Development Report 1995. Oxford University Press. New York
- Zayendra, 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan Belanja Modal sebagai variabel pemedediasi.